



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh
Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu
NIM.130810101026

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

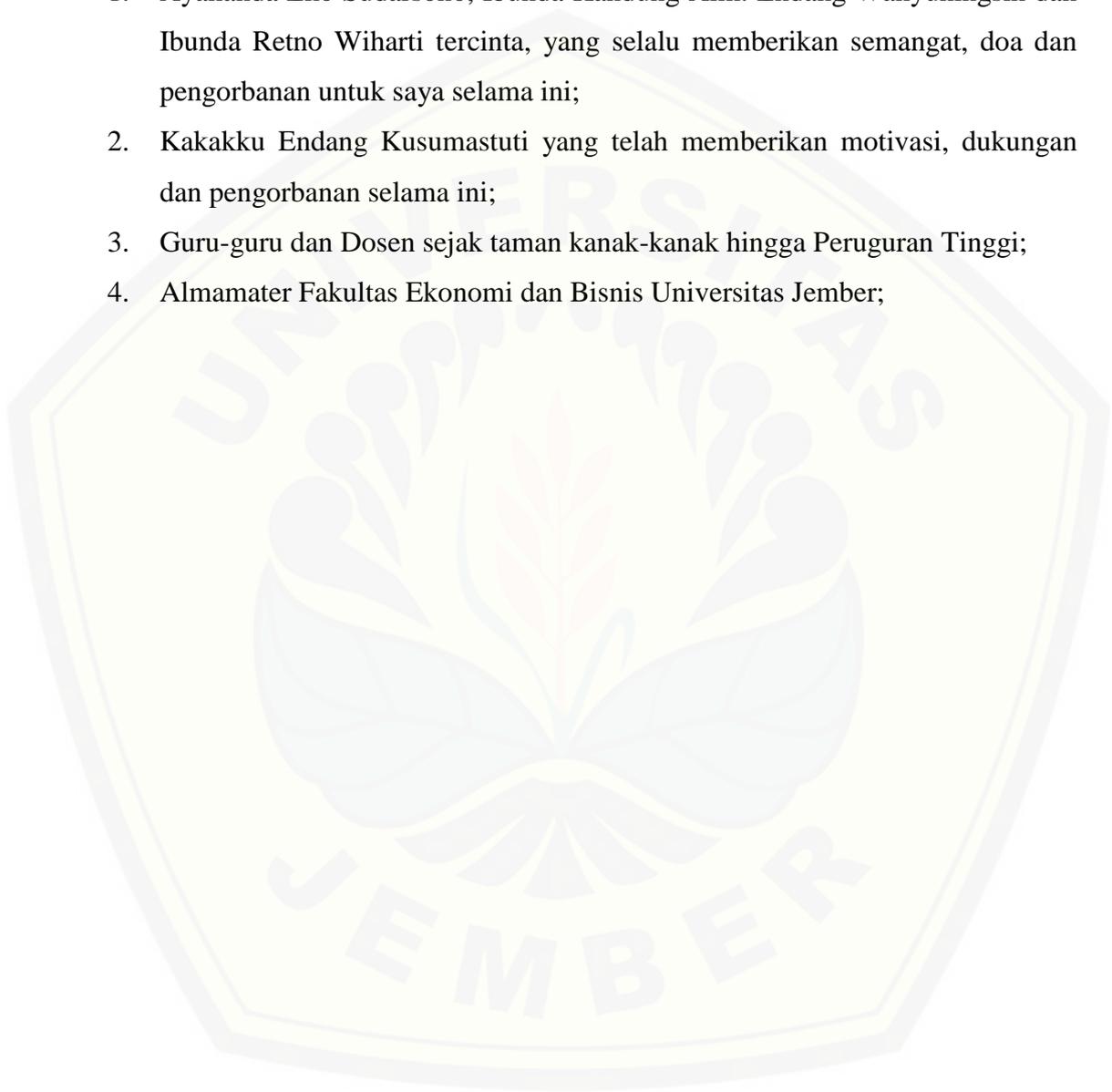
Oleh
Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu
NIM.130810101026

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Eko Sudarsono, Ibunda Kandung Alm. Endang Wahyuningsih dan Ibunda Retno Wiharti tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa dan pengorbanan untuk saya selama ini;
2. Kakakku Endang Kusumastuti yang telah memberikan motivasi, dukungan dan pengorbanan selama ini;
3. Guru-guru dan Dosen sejak taman kanak-kanak hingga Peruguran Tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;



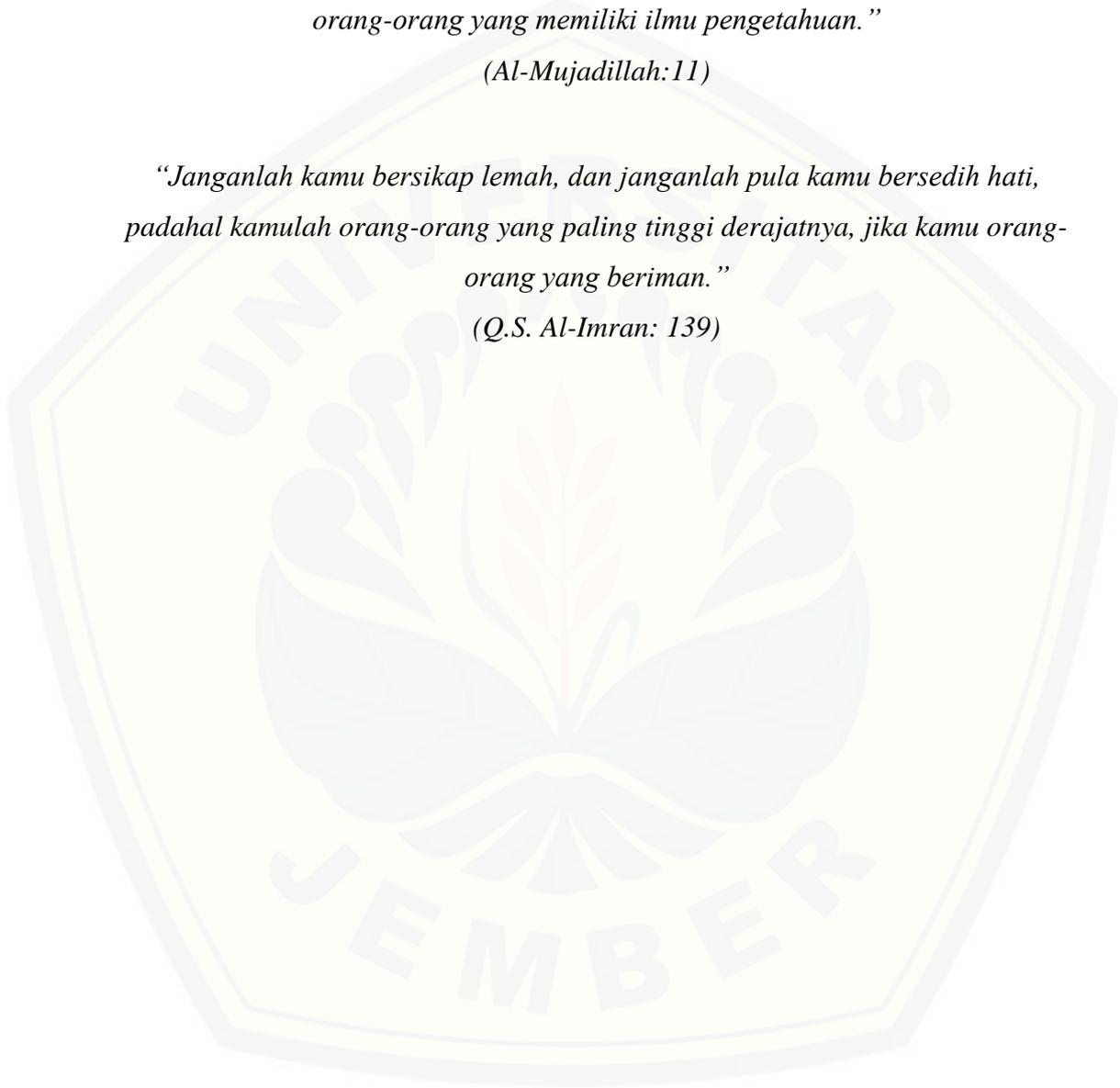
MOTTO

”Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.”

(Al-Mujadillah:11)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S. Al-Imran: 139)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu

NIM : 130810101206

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Juli 2018

Yang menyatakan,

Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu
NIM 130810101206



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu

NIM 130810101206

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama
Dosen Pembimbing Anggota

: Drs. Badjuri, M.E
: Dr. Moh. Adenan, M.M

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur.

Nama Mahasiswa : Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu
NIM : 130810101206
Fakultas : Ekonomi dan bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 25 Juni 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Badjuri. M.E
NIP. 195312251984031002

Dr. Moh. Adenan. M.M
NIP. 196610311992031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin. M.Kes
NIP. 1964 1108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu

Nim : 130810101206

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu

*Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan digencarkannya program pembangunan di daerah, terutama pembangunan daerah pinggiran. Guna lancarnya pembangunan di daerah, maka daerah harus memiliki kondisi keuangan yang baik. Padahal, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam segi penerimaan maupun pengeluaran demi mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah yang ada di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel, jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah tahun 2012-2016. Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Jawa Timur.

Kata kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto

Analysis Effect Growth Economics, Wages Minimum, and Open Unemployment Rate Towards Poverty Rate in Province East Java

Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu

*Department of Development Economics, Faculty of Economics and Bussines,
University of Jember*

ABSTRACT

Equity of development is created when development is not only centered on growth centers, but through regional development. As has been applied by the government of Indonesia with the intensification of development programs in the region, especially the development of periphery areas. In order to smooth development in the region, then the region must have a good financial condition. In fact, the financial aspect is a central issue of local government in terms of revenue and expenditure for the sake of prospering the community. The purpose of this study is to know the magnitude of the influence of local revenues, general allocation funds, and gross regional domestic product to regional spending in East Java. The method used is multiple linear regression using the classical assumption test (Ordinary Least Square) using panel data, the type of data used is secondary data include local revenue, general allocation funds, and regional gross domestic product to the regional expenditure of 2012-2016 . The result of data analysis with multiple linear regression obtained result from research indicate that local revenue, general allocation fund and gross regional domestic product have positive and significant influence to regional expenditure in East Java

Keyword: Regional Expenditure, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Gross Regional Domestic Product

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur; Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu, 130810101206; 2018; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.

Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan digencarkannya program pembangunan di daerah, terutama pembangunan daerah pinggiran. Diharapkan dengan diberlakukannya pembangunan di daerah akan melatih kemandirian daerah dalam pembangunan daerah. Guna lancarnya pembangunan di daerah, maka daerah harus memiliki kondisi keuangan yang baik. Padahal, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam segi penerimaan maupun pengeluaran demi mensejahterakan masyarakat. Aspek keuangan merupakan satu dasar kriteria guna mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, kemampuan daerah yang dimaksud berupa seberapa jauh pemerintah daerah menggali sumber keuangan guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah yang ada di Jawa Timur. Dan juga melihat variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap belanja daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel.

Hasil estimasi regresi linier berganda, secara bersama-sama (uji F) terdapat pengaruh signifikan dari variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah dengan probabilitas F-statistik 0,000000. Hasil analisis secara parsial (uji t) diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan pada taraf α

= 0,05 terhadap belanja daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000, variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada taraf $\alpha = 0,05$ terhadap belanja daerah dengan nilai T_{hitung} sebesar 2,127 variabel produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah taraf $\alpha = 0,05$ terhadap belanja daerah dengan nilai T_{hitung} sebesar 6,263. Hasil koefisien determinasi (*Adjusted R-square*) sebesar 0.772, dengan demikian dapat diartikan bahwa total variasi belanja daerah di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel independen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto sebesar 77,2 persen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Drs. Badjuri, M.E , selaku pembimbing I dan bapak Dr. Moh. Adenan, M.M selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna/berarti bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Agus Luthfi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindratin, M.Kes selaku Ketua Jurusan IESP Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Para dosen penguji penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya selama kurang lebih 5 (lima) tahun perkuliahan.
7. Ayahanda Eko Sudarsono dan Ibunda Retno Wiharti tersayang, atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti yang sangat besar dan tak ternilai harganya bagi saya dan atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT akan membalasnya.
8. Suci Nur Jannah yang telah mendampingi dari awal hingga akhir proses pengerjaan Skripsi, sekaligus sebagai motivator dan penyemangat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pembangunan Wilayah	8
2.1.2 Otonomi Daerah	10
2.1.3 Keuangan Daerah	11
2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah	17
2.1.5 Pengelolaan Sumber Daya	19
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto	19

2.1.7 Belanja Daerah	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Hipotesis Penelitian.....	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Populasi dan Sampel.....	27
3.3 Jenis Data.....	27
3.4 Metode Analisis Data.....	28
3.4.1 Analisis Regresi Berganda	30
3.5 Uji Statistik	30
3.5.1 Uji F.....	30
3.5.2 Uji T	31
3.5.3 Koefisien Determinasi(R^2)	32
3.6 Uji Asumsi Klasik	32
3.6.1 Uji Multikolinieritas	32
3.6.2 Uji Autokorelasi	33
3.6.3 Uji Heterokedastisitas	33
3.6.4 Uji Normalitas	33
3.7 Definisi Operasional	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum	36
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur.....	36
4.1.2 Jumlah Penduduk	37
4.2 Analisis Deskriptif	39
4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda	39
4.3 Uji Statistik	41
4.3.1 Uji F	41
4.3.2 Uji T.....	41
4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)	42
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	43

4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	43
4.4.2 Uji Autokorelasi.....	44
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	44
4.4.4 Uji Normalitas	45
4.5 Pembahasan	45
4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.....	45
4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.....	47
4.5.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah.....	48
BAB 5 KESIMPULAN,KETERBATASAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun 2012-2016.....	3
Tabel 1.2 Belanja Daerah Bidang Kesehatan dan Provinsi PDRB Jawa Timur Tahun 2012-2016.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.....	40
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda	42
Tabel 4.4 Hasil Uji F.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji t.....	43
Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Glesjer</i>	47
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>Jarque – Berra Test</i>	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Peta Wilayah Jawa Timur di 38 Kabupaten/Kota.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Kesehatan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.....	
Lampiran 2. Perhitungan e-views.....	
2.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	
2.2 Uji Asumsi Klasik	
2.2.1 Uji Multikolinearitas	
2.2.2 Uji Autokorelasi.....	
2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	
2.2.4 Uji Normalitas.....	
Lampiran 3. Analisis Deskriptif	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan digencarkannya program pembangunan di daerah, terutama pembangunan daerah pinggiran. Diharapkan dengan diberlakukannya pembangunan di daerah akan melatih kemandirian daerah dalam pembangunan daerah. Untuk menciptakan suatu pembangunan daerah yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, pemerintah menetapkan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan republik dan terbagi atas beberapa wilayah yang bersifat otonom. Penetapan ini tercermin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 1, telah disebutkan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang (UUD 1945).

Pertengahan 1998 terdapat tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah serta tuntutan pelaksanaan good governance, mendorong pemerintah mengeluarkan perundang-undangan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam UU. No. 22 tahun 1999 dan UU. No. 25 tahun 1999 yang merupakan titik awal terpenting dari sejarah desentralisasi di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat (Murjana, 2016). Seiring berjalannya waktu UU. No. 22 tahun 1999 dirasa kurang sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka digantikan dengan aturan baru yaitu UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU. No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah (Ulum, 2004). Pemerintah mengharapkan dari UU terbaru tersebut suatu daerah lebih mampu melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang lebih prima (Murjana, 2016).

Guna lancarnya pembangunan di daerah, maka daerah harus memiliki kondisi keuangan yang baik. Padahal, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam segi penerimaan maupun pengeluaran demi mensejahterakan masyarakat. Menurut Kaho (1998), aspek keuangan merupakan satu dasar kriteria guna mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, kemampuan daerah yang dimaksud berupa seberapa jauh pemerintah daerah menggali sumber keuangan guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat (Riskiano, 2011).

Pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai dengan menuntut pemerintah daerah agar mampu mengelola keuangan daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki tiap daerah (sholikhah, 2011). Berkenaan dengan pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah, apabila penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara baik, efektif dan efisien dimana memenuhi prinsip value of money serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel maka akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Khakim, 2011).

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah, apabila kinerja keuangan daerah dinyatakan baik, maka daerah tersebut memiliki kemampuan untuk pembiayaan pelaksanaan urusan daerah dalam otonomi daerah. Apabila realisasi PAD masih tergolong kecil dan masih belum mencukupi pembiayaan daerah maka menandakan bahwa rasio keuangan daerah tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya rasio keuangan ini mengindikasikan kinerja keuangan daerah tersebut juga rendah karena masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan daerah sehingga perlu langkah strategis guna peningkatan PAD (Prawoto, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya. Pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 tertera pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun 2012-2016

Subjek	2012	2013	Tahun 2014	2015	2016
Pajak Daerah	7.502.400	7.863.719.6335	9.285.000	12.591.000	12.579.000.000
Retribusi Daerah	123.663.97	1.264.057.555	104.887.319.435	136.337.487.000	111.423.347.740
Bagian Laba BUMD	320.317.073.588	328.891.596.516	339.967.745.080	351.344.506.000	365.628.869.523
Pendapatan lain-lain	1.121.779.005	120.488.498.196	137.370.973.732	169.245.728.200	2.189.189.582.950
TOTAL PAD	9.068.160.048.588	9.523.901.967.476	11.103.564.801.835	14.771.139.275	15.245.241.800.213

(Sumber: DJPK Jawa Timur, 2012 - 2016)

Berdasarkan tabel 1.1 tentang perkembangan realisasi penerimaan daerah propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan pendapatan lain-lain hasil kekayaan daerah semakin meningkat tiap tahunnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satunya yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Daerah di daerahnya.

Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Akan tetapi pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan dan program-program layanan publik.

Aktivitas pembangunan dan program-program layanan publik misalnya belanja daerah bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak besar terhadap kondisi produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Berikut merupakan tabel bidang kesehatan dan PDRB pada Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 :

Tabel 1.2 Belanja Daerah Bidang Kesehatan dan PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

Subjek	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Bidang Kesehatan	1.838.068.137.	2.070.310.334.	2.256.644.386.	2.958.318.404.	3.344.147.112.
PDRB	951	517	486	017	326
	1.124.464.600	1.382.501.500	1.537.947.600	1.692.903	1.705.236.100

(Sumber: BPS Jawa Timur, 2012-2016)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 belanja daerah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan. Begitu juga, dengan Produk Domestik Regional Bruto juga semakin naik. Hal ini mengartikan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur berjalan baik karena sistem pembangunan

ekonominya telah terealisasi secara nyata, dimana belanja daerah bidang kesehatan tiap tahunnya meningkat sehingga PDRB juga meningkat.

Peneliti sebelumnya seperti Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatera Utara, Kesit Bambang Prakosa yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, serta Widiyanto (2005) yang juga meneliti di DIY dan Jawa Tengah memperoleh hasil yaitu PAD kurang signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *flypaper effect*. Hal ini sesuai hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah yang diterima.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada Belanja Daerah Sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat/publik juga masih terjadi *flypaper effect* atau tidak. Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi *flypaper effect*, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi *flypaper effect*.

Penelitian lain dilakukan oleh Prakosa (2004), yang melakukan penelitian pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah Belanja Daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan daripada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pempus (salah satunya DAU). (Prakosa, 2004) Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
3. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori

1. yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.
2. Bagi pemerintah daerah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governance*.

3. Bagi pembaca dan almamater Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja daerah di pemerintah daerah



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Wilayah

Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah adalah kumpulan daerah berhamparan sebagai satu kesatuan geografis dalam bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia serta posisi geografis yang dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif (Miraza, 2005). Pembangunan wilayah dapat diartikan sebagai upaya dalam perumusan dan pengaplikasian kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal yang berkelanjutan (Siswanto, 2014).

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Teori Adam Smith tergolong pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik bahwa, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Adapun bunyi dari teori Adam Smith adalah “*An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation*”, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (teori tangan-tangan gaib). Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor

yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan *output* total (Ricardo dan Hariani, 2008).

b. Teori Dualisme Boeke

Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir berkebangsaan Belanda, yaitu J.H. Boeke, yang mencermati pada negara-negara bekas jajahan negaranya, khususnya Indonesia. Boeke melihat, bahwa nilai-nilai sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Menurut Boeke, apabila masyarakat terlalu terpaku pada tata sosial budaya yang ada, maka usaha menggerakkan stagnasi ekonomi tidak akan berhasil. Pengamatan Boeke sejauh ini menunjukkan bahwa tata sosial budaya masyarakat negara berkembang (terutama Indonesia) masih bersifat tidak rasional dan kaku sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan pola/ irama perekonomian modern dengan bentuk kelembagaan usaha yang praktis dan dinamis. Kondisi ini tampak terkait dengan dualisme yang berkembang di kalangan masyarakat negara-negara berkembang dalam menggerakkan perekonomiannya. Dualisme yang dimaksud oleh Boeke adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya luar dan budaya lokal. Sebagian masyarakat memandang bahwa benturan antara budaya luar (bersumber dari barat) dengan budaya lokal (penduduk asli/pribumi) dianggap tidak bisa berubah (permanen), tidak dapat dihindari dan benturan ini pada akhirnya dianggap yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi oleh masyarakat tradisional setempat. Teori ini membedakan antara kebutuhan yang bersifat ekonomis dan kebutuhan yang bersifat sosial.

Menurut Boeke, pola pemenuhan kebutuhan masyarakat barat didasarkan pada pertimbangan ekonomi rasional (pertimbangan ekonomis). Sebaliknya pemenuhan kebutuhan masyarakat di negara-negara bekas jajahan, didasarkan pada kebutuhan non-ekonomis, yang umumnya adalah untuk mempertahankan gengsi (*prestige*) di mata masyarakat sosialnya. Menurut Teori Dualisme Boeke, penawaran (*pasok*) produk barang tidak responsif terhadap tarikan harga. Bahkan sebaliknya karena *pasok* barang tersebut tidak bermotif menambah laba (*profit motivated*) maka kenaikan harga tidak menjadi insentif bagi masyarakat pribumi untuk meningkatkan pasokan. Demikian pula halnya dalam masalah pasokan

tenaga kerja. Kurva suplai tenaga kerja bukan lurus ke kanan atas, melainkan akan membalik ke kiri pada titik tertentu sejalan dengan meningkatnya upah atau dikenal sebagai backward banding supply curve of labor. Dari sini Boeke menilai, bahwa gejala ini mengindikasikan adanya kelompok pemalas. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa dasar analisis dalam Teori Dualisme Boeke adalah serangkaian dasar tata nilai masyarakat negara berkembang, yang tidak mendukung untuk perbaikan ekonomi. Berdasarkan keyakinannya tentang tata nilai masyarakat negara berkembang, Boeke berpendapat bahwa yang terbaik adalah membiarkan masyarakat tersebut seperti apa adanya (*just leave it alone*) dan membiarkan mereka untuk berpikir luhur, tetapi tetap miskin (*high thinking and plain living*) (Boeke, 1953).

2.1.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya (Nurcholis, 2007).

2.1.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005). Selain dalam bentuk kekayaan daerah, keuangan daerah juga berupa sumber keuangan daerah, dimana melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Pasal 6 Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam keuangan daerah berupa :

- a. Pendapatan Daerah, bersumber dari :
 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari hasil ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a) Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Provinsi dan Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis-jenis pajak di atas merupakan salah satu dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah. Setiap jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah kepada tiap pribadi atau badan tanpa adanya imbalan secara langsung, maksudnya yaitu iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak secara

langsung dapat dinikmati namun digunakan untuk kepentingan bersama yang sifatnya lebih umum. Pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa ada imbalan jasa yang sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Dari hasil pemungutan pajak tersebut maka menjadi kewenangan bagi daerah untuk mengelolanya karena hal tersebut merupakan keleluasaan pemerintah daerah, jadi dari perpajakan ini pemerintah daerah dapat menetapkan dan mengendalikan tarif pajak yang ada di daerahnya.

b) Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah (Kaho, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan jenisnya, retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan karena dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan.

Pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pribadi/badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu

c) Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sementara itu berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jenis penerimaan yang

termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat (2), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 2. Jasa giro
 3. Pendapatan bunga
 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
2. Dana Perimbangan merupakan penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna mendukung pendanaan dalam otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari:
- a) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna mendukung pendanaan dalam otonomi daerah.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah Dana Alokasi penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah otonom yang bertujuan guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Dalam penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan suatu formula yang berdasarkan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal grip) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan tertentu guna mendanai kegiatan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan
 - b. Pembiayaan Daerah, bersumber dari:
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 2. Penerimaan pinjaman daerah
 3. Dana cadangan daerah
 4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan alat manajemen guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas dalam pemerintah daerah (Wenny, 2012). Pengukuran kinerja, akan terdapat umpan balik karena terdapat suatu penilaian sehingga terdapat upaya perbaikan secara terus menerus dalam suatu periode. Penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berperan sebagai mekanisme yang memberikan penghargaan serta hukuman, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan manajemen guna memperbaiki kinerja suatu organisasi (Adisasmita, 2011).

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan kombinasi pengukuran guna melihat suatu kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004). Kinerja keuangan daerah juga dapat dimaknai sebagai pencapaian kerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan serta pengeluaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Syamsi (1986), kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali serta mengelola sumber keuangan asli daerah guna pemenuhan kebutuhan sebagai pendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasan dalam menggunakan dana untuk

kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan perundang-undangan (Himran, 2014).

Menurut Halim (2001) bahwa terdapat 3 bidang yang terkait satu sama lain dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

a. Analisis Penerimaan

Analisis penerimaan mengenai kemampuan pemerintah daerah menggali sumber penerimaan daerah dan mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan guna meningkatkan penerimaan dalam rangka otonomi daerah.

b. Analisis Pengeluaran

Analisis pengeluaran membahas tentang biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam otonomi daerah guna peningkatan pelayanan publik dan melihat faktor apa saja yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.

c. Analisis Anggaran

Analisis anggaran menyatakan bahwa pengangguran antara pendapatan dan pengeluaran yang tercermin dalam APBD serta bagaimana kecenderungan proyeksi guna masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja keuangan daerah, digunakan untuk suatu analisis rasio keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Suprpto (2006) hasil analisis rasio keuangan tersebut digunakan dalam :

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah guna mendukung keberhasilan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat perkembangan dan pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.

2.1.5 Pengelolaan Sumber Daya

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

c. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2010). Perhitungan angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

- b. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti: (a) pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan stok, dan (e) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- c. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan pendapatan yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB ADHB ini digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada suatu tahun. Perkembangan PDRB ADHB dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Oleh karenanya untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral.

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran. Kenaikan pendapatan per kapita dapat tidak menaikkan standar hidup riil masyarakat apabila pendapatan per kapita meningkat akan tetapi konsumsi per kapita turun. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan tersebut hanya dinikmati oleh beberapa orang kaya dan tidak oleh banyak orang miskin. Di samping itu, rakyat mungkin meningkatkan tabungan mereka atau bahkan pemerintah sendiri

menghabiskan pendapatan yang meningkat itu untuk keperluan militer atau keperluan (Jhingan, 2010).

2.1.7 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.

Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak terduga sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset kekayaan bagi daerah, belanja rutin terdiri :

1. Belanja administrasi umum
2. Belanja Pegawai
3. Belanja Barang
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanja Pemeliharaan
6. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum

b. Belanja Investasi

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari :

1. Belanja Publik

Belanja publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

2. Belanja Aparatur

Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

3. Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer adalah pengalihan utang pemerintah daerah dengan kriteria berikut:

- a) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam pembelian dan penjualan.
- b) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- c) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.

Pengeluaran transfer terdiri atas angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

a. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan berikut:

1. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
2. Tagihan tahun lain yang belum diselesaikan dan / atau yang tidak tersedia anggarannya pada tahun lalu yang bersangkutan.
3. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan / atau kelebihan penerimaan.

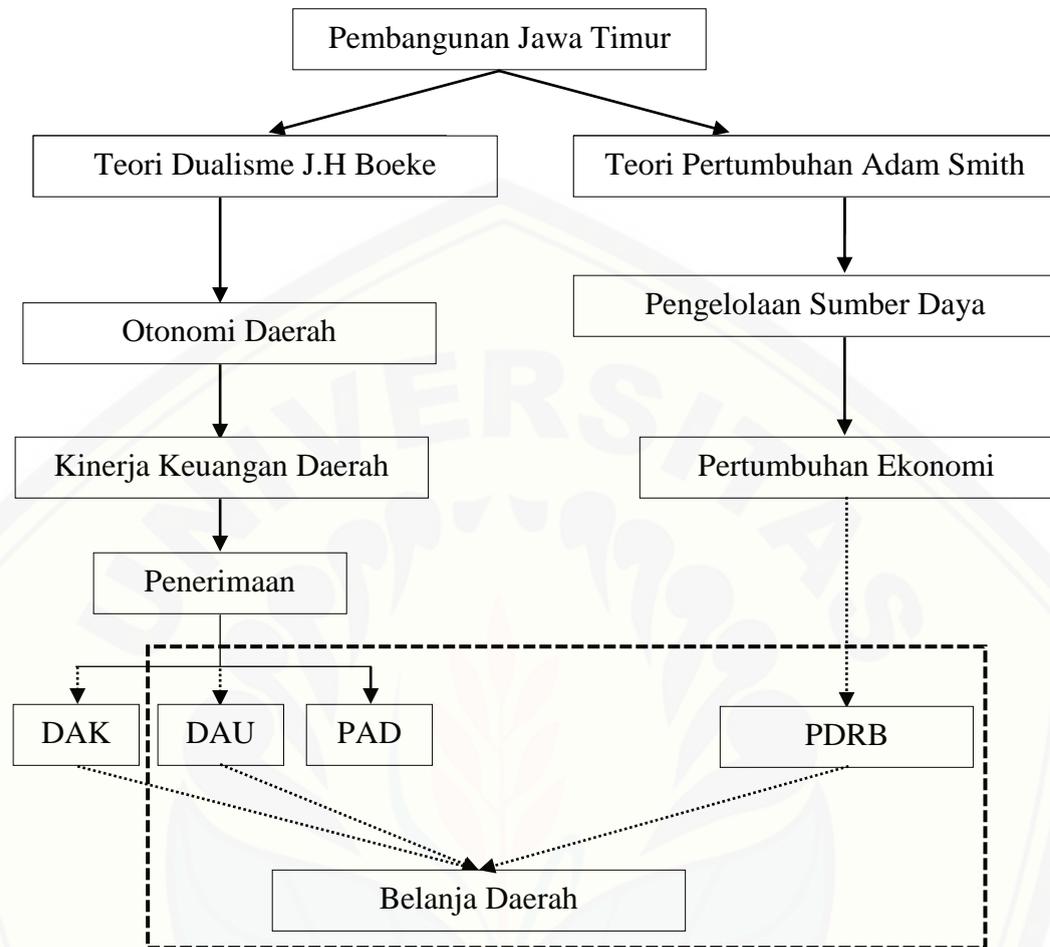
(Suparman, 2003)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Surya Hamdani, Sri Mintarti, Agus Setiawaty (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah
2	Deva Yoga Permana (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Analisis Regresi Berganda	Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
3	Anjar Setiawan (2010)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah
4	Kesit Bambang Prakosa (2004)	Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan	Simple regression dan multiple regression	Hasil menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Prediksi Belanja Daerah

		Tengah dan DIY)	Prediksi Belanja Daerah		
5	Fitria wulandari, Azrizal dan Jolianis (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012)	PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah	Analisis Regresi Berganda	Hasil menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

2.3 Kerangka Konseptual



Keterangan :



= tidak diteliti oleh peneliti



= diteliti oleh peneliti

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Penarikan hipotesis ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang harus diuji menggunakan data yang dikumpulkan. Berdasarkan rumusan masalah kedua dan teori yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada provinsi Jawa Timur
2. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada provinsi Jawa Timur
3. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada provinsi Jawa Timur.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto. Wilayah penelitian di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Selama waktu empat tahun dari 2012 – 2016.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek-obyek (satuan/individu) yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data DAU, PAD, Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 29 daerah Kabupaten dan 9 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 38 data.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *full sampling*, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2012-2016, dengan jumlah sampel sebanyak 38 daerah, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $5 \times 38 = 190$ data.

3.3 Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Supranto, 1999). Data sekunder yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2016.

3.4 Metode Analisis Data

Metode ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel. Metode regresi data panel ini digunakan untuk mengestimasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Melalui metode *OLS* ini maka akan memberikan hasil regresi yang baik tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2006). Data panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara data runtun waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Sebagai alat pengolahan data digunakan program *Eviews 9*. Data panel digunakan karena memiliki beberapa kelebihan, Baltagi dalam Gujarati (2012) menjelaskan tentang beberapa kelebihan data panel diantaranya :

- a. Data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara dan lain – lain, dari waktu ke waktu terdapat batasan heterogenitas dalam unit – unit tersebut. Teknik estimasi data panel yang heterogen tersebut secara eksplisit dapat diperhitungkan.
- b. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, data panel dapat memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, derajat bebas lebih besar dan lebih efisien.
- c. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, daripada studi berulang – ulang *cross section*.
- d. Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur dampak sederhana yang tidak dapat dilihat pada data *time series* murni ataupun *cross section* murni.
- e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. Misalnya fenomena perekonomian berskala dan perubahan teknologi lebih tepat dipelajari menggunakan data panel.
- f. Data panel bisa meminimumkan bias yang terjadi apabila kita mengagregasi individu – individu atau perusahaan – perusahaan kedalam agregasi besar dengan membuat data menjadi beberapa ribu unit.

Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Sedangkan model data panel dengan persamaan model data *time series* adalah:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana T adalah banyaknya data *time series*.

Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka dapat ditulis dengan model berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$T = 1, 2, \dots, T$; dan $i = 1, 2, \dots, N$

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya observasi

N x T = Banyaknya data panel

Adapun fungsi model ekonomi dari variabel penelitian sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3)$$

Model ekonomi tersebut kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika dengan menggunakan data panel menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, 38 ; t = 1, 2, \dots, 4$$

Dimana :

$$i = 1, 2, \dots, 38 ; t = 1, 2, \dots, 4$$

Y : Belanja Daerah (%)

X1 : Pendapatan Asli Daerah (%)

X2 : Dana Alokasi Umum (Rupiah)

X3 : Produk Domestik Regional Bruto (%)

α : intersep

β_{it} : koefisien variabel

$i = 1, 2, \dots, 38$: banyaknya sampel observasi

$t = 1, 2, \dots, 4$: banyaknya sampel waktu

3.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, dimana rumusnya:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Belanja daerah bidang kesehatan

a = Konstanta regresi

X₁ = Dana alokasi umum

X₂ = Pendapatan asli daerah

X₃ = Produk Domestik Regional

b₁, b₂ = Koefisien regresi

(Ghozali, 2005).

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dan nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima (Ghozali, 2005).

3.5 Uji Statistik

Dari persamaan regresi data panel, selanjutnya dilakukan pengujian statistik antara lain: (a) Uji F_{statistik} (uji pengaruh secara simultan), (b) uji t_{statistik} (uji pengaruh secara parsial), (c) uji R² (koefisien determinasi).

3.5.1 Uji F (uji pengaruh secara simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka secara bersama – sama terhadap kemiskinan di Jawa Timur:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{1 - R^2 / (n-1)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti variabel Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- 2) $H_a = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti variabel Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pada taraf signifikan 5% kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- 1) Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel independen secara serentak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji t (secara parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b}{sb}$$

Uji t dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat diperoleh dari nilai t statistik pada output evIEWS, sedangkan nilai t tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menggunakan *degree of freedom* (df) sebesar n-k. Apabila t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sebaliknya jika t hitung lebih kecil daripada t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas output evIEWS dengan nilai α 5% (0,05).

3.5.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R²* (Ghozali, 2005).

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam hal ini variabel – variabel bebas tersebut tidak ortogonal. Variabel yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya sama dengan nol. Dalam uji ini dilakukan pendeteksian terlebih dahulu, kemudian jika hal tersebut terjadi, barulah dilakukan tindakan untuk menghilangkan efek dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas maka dapat dilakukan dengan dengan menguji koefisien antar variabel independen. Apabila koefisien korelasinya cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga model tersebut terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, Apabila koefisien korelasi rendah dibawah 0,85 maka model tersebut tidak terdapat multikolinearitas. Selain itu juga dengan *auxiliary regression*, yaitu dengan membandingkan nilai R^2 model utama dengan regresi dari masing – masing variabel bebasnya. Jika nilai R^2 parsial dari masing – masing variabel

bebas lebih tinggi dari R^2 model utama, dalam model regresi terjadi penyimpangan asumsi kalsik multikolinearitas (Ghozali, 2005)

3.6.2 Autokorelasi

Satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik ialah bahwa tidak ada autokorelasi, yaitu korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu (*data time series*) dan data silang waktu (*data cross section*). Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan Uji statistik Durbin Watson sebagai berikut :

- a. H_0 : Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif
- b. H_a : Ada autokorelasi baik positif maupun negatif

Jika dilakukan dengan pengujian tes hipotesis Durbin Watson adalah:

- a. $d < d_l$ = menolak H_0
- b. $d > 4 - d_l$ = menolak H_0
- c. $d_u < d < 4 - d_u$ = menerima H_0
- d. $d_l \leq d \leq d_u$ = pengujian tidak meyakinkan
- e. $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = pengujian ragu-ragu

(Ghozali, 2005).

3.6.3 Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah menguji sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dan residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji *glesjer*. Apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

3.6.4 Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian ini menggunakan pendekatan *Jarque-berra test* (JB-test) (Ghozali, 2005).

- 1) Bila nilai $JB_{hitung} > \chi^2$ tabel atau nilai probabilitas $JB_{hitung} < \text{nilai probabilitas}$ ($\alpha = 5\%$), maka data terdistribusi normal.

- 2) Bila nilai $JB_{hitung} < \chi^2$ tabel atau nilai probabilitas $JB_{hitung} >$ nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka data tidak terdistribusi normal.

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel dependen dapat dilambangkan dalam Y, Yang menjadi Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (dalam rupiah). Variabel Independen Variabel independen merupakan variabel bebas yang menggambarkan tujuan penelitian. Membentuk variabel dependen. Variabel independen dapat ditulis dalam X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan realisasi penerimaan asli daerah yaitu : pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (dalam rupiah).
- b. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) atau transfer adalah dana dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai pelayanan dasar pemerintah kabupaten/kota.(dalam rupiah).
- c. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data produk domestik regional bruto (PDRB) diambil dari data PDRB tahunan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik periode tahun

2008. Pada penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, karena PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara riil di suatu daerah dengan mengabaikan laju inflasi (Kuncoro, 2004).(dalam rupiah). Guna mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) maka penelitian ini menggunakan alat analisis regresi Ordinary Least Square (OLS).Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BD = a + b1 .PAD + b2 . DAU + b3 . PDRB + e$$

Keterangan:

BD	= Belanja Daerah
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
e	= komponen error dalam model penelitian
a	= intersep
b1,b2,b3	= slope

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian regresi linier berganda atas Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Daerah semakin meningkat.
2. Hasil pengujian regresi linier berganda atas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat.
3. Hasil pengujian regresi linier berganda atas Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto maka Belanja Daerah semakin meningkat

5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Dana Alokasi Umum disarankan untuk memperhatikan produktivitas dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya masing-masing agar dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Badan Pusat Statistik. 2010. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta : BPS.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Jawa Timur dalam Angka*. Jawa Timur : BPS.

Badan Pusat Statistik. 2013. *Jawa Timur dalam Angka*. Jawa Timur : BPS.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Jawa Timur dalam Angka*. Jawa Timur : BPS.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Jawa Timur dalam Angka*. Jawa Timur : BPS.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Timur dalam Angka*. Jawa Timur : BPS.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Jawa Timur dalam Angka*. Jawa Timur : BPS.

Boeke, J. H. 1953. *Memperkenalkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Ganda*. Jakarta : YOI.

Chang, T., dan Y. Ho. 2002. Tax or Spend, What Cause What: Taiwan's Experience. *International Journal of Business and Economics*. 1(2): 157-165.

- Cheng, B. S. 1999. Casualty Between Taxes and Expenditure : Evidence from Latin American Countries. *Journal of Economics and Finance*. 23(2): 184-192.
- Friedman, M. 1978. The Limitation of Tax Limitation. *Policy Review*. 5: 7-14.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. N., dan D. C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Lima Buku Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., dan S. Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2 / Tahun XIII / 25*.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Himran, Y. dkk. 2014. Analisis Kinerja Keuangan dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Banggai. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Holtz-Eaken, D. H., H. S. Rosen, dan S. Tilly. 1994. In Tertemporal Analysis of State an Local Government Spending: Theory and Test. *Journal of Urban Economics*. 35: 159-174.
- Hoover, K. D., dan S. M. Sheffrin. 1992. Causation, Spending and Taxes: Sand in the Sandbox or Tax Collector for the Welfare State?. *The American Economics Review*. 82(1): 225-248.

Indiyani, D. A. 2014. Pengaruh PDRB , Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi*.

Jhingan, M. I. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kaho, J. R. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Tentang Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mankiw. 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga.

Miraza, B. H. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bandung : ISEI.

Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.

Siswanto, G. 2014. Pengembangan Ekonomi Wilayah Kota Metro Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Provinsi Lampung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Suparman, M., dan Suwarna. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : PT. Alumni.

Supranto. 1999. *Statistik Multivariat*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suprpto, T. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Indonesia Yogyakarta.

Syamsi, I. 1986. *Pokok-pokok Kebijakanaksanaan, Perencanaa, Pemograman, dan Pengangguran Pembangunan Tingkat Nasional*. Jakarta : CV. Rajawali.

Wenny, C. D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*. 2(1) : 39-51.

www.bps.go.id

www.jatimbps.go.id

www.dpjk.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Kesehatan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	DAU	PDRB	Belanja Daerah
Kabupaten Bangkalan	2012	62.836	700.513	67248.80	133.753
Kabupaten Banyuwangi	2012	119.657	1.030.217	37262	154.041
Kabupaten Blitar	2012	77.036	845.118	17665	96.554
Kabupaten Bojonegoro	2012	135.697	785.585	9568.20.00	170.535
Kabupaten Bondowoso	2012	57.780	666.857	37235.70	116.703
Kabupaten Gresik	2012	325.315	711.868	18562.70	185.572
Kabupaten Jember	2012	211.618	1.279.296	16053.40	227.944
Kabupaten Jombang	2012	117.508	809.296	39047.30	179.395
Kabupaten Kediri	2012	83.052	925.533	18054.50	163.769
Kabupaten Lamongan	2012	108.606	832.016	31816.30	155.350
Kabupaten Lumajang	2012	87.054	736.273	47076	125.604
Kabupaten Madiun	2012	57.699	645.865	12767	99.029
Kabupaten Magetan	2012	61.157	677.454	9135.70	119.428
Kabupaten Malang	2012	154.258	1.281.613	20538.30	170.324
Kabupaten Mojokerto	2012	107.074	733.782	93543.90	122.996
Kabupaten Nganjuk	2012	98.689	827.299	19514.80	175.046
Kabupaten Ngawi	2012	51.643	796.834	9251.20.00	110.764
Kabupaten Pacitan	2012	44.997	589.830	7705	96.737
Kabupaten Pamekasan	2012	56.161	625.873	10910.90	125.548
Kabupaten Pasuruan	2012	152.010	876.732	16936.80	154.635
Kabupaten Ponorogo	2012	77.382	779.078	10038.40	148.442
Kabupaten Probolinggo	2012	70.908	761.570	9411.60	126.430
Kabupaten Sampang	2012	52.287	603.996	16173.70	91.023
Kabupaten Sidoarjo	2012	597.756	974.571	70167.10	342.967
Kabupaten Situbondo	2012	57.030	616.094	9583.40.00	111.159
Kabupaten Sumenep	2012	69.787	807.976	7894	133.262
Kabupaten Trenggalek	2012	67.278	654.343	8959.50.00	121.682
Kabupaten Tuban	2012	119.900	757.907	38136.10	136.051
Kabupaten Tulungagung	2012	110.503	878.221	18999	158.339
Kota Batu	2012	31.494	324.769	265892.10	20.260
Kota Blitar	2012	54.987	315.773	63185.10	71.005
Kota Kediri	2012	101.474	490.372	7473.60	176.288

Kota Madiun	2012	46.554	413.004	3358.40.00	55.078
Kota Malang	2012	175.985	665.928	3236.60	80.384
Kota Mojokerto	2012	48.056	309.103	4051.20.00	110.670
Kota Pasuruan	2012	33.207	319.425	5552.10.00	50.381
Kota Probolinggo	2012	60.446	367.601	35355.70	78.301
Kota Surabaya	2012	235.332	1.061.626	6937.70	716.914



Lampiran 2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Kesehatan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	DAU	PDRB	Belanja Daerah
kabupaten Bangkalan	2013	83.249	778.024	71314.20	181.759
kabupaten Banyuwangi	2013	161.976	1.154.495	39519.20	191.542
kabupaten Blitar	2013	96.053	944.298	20218.10	133.734
kabupaten Bojonegoro	2013	195.973	876.022	10094	231.349
kabupaten Bondowoso	2013	67.784	752.777	39733.60	125.381
kabupaten Gresik	2013	423.217	804.904	19848.80	277.137
kabupaten Jember	2013	290.135	1.417.604	16949.60	300.305
kabupaten Jombang	2013	143.932	920.098	41608.40	221.379
kabupaten Kediri	2013	126.027	1.056.481	18967.30	242.661
kabupaten Lamongan	2013	124.606	958.345	33678.80	172.573
kabupaten Lumajang	2013	107.282	828.525	49571.70	159.431
kabupaten Madiun	2013	65.989	734.152	13456	126.198
kabupaten Magetan	2013	74.500	761.637	9654.10.00	124.596
kabupaten Malang	2013	192.761	1.439.234	21733.50	185.960
kabupaten Mojokerto	2013	190.236	832.267	99992.50	146.649
kabupaten Nganjuk	2013	118.057	928.266	20672.30	214.686
kabupaten Ngawi	2013	74.198	896.053	9792.60	131.350
kabupaten Pacitan	2013	57.171	647.293	8157.60	110.999
kabupaten Pamekasan	2013	67.761	702.610	11623.80	134.642
kabupaten Pasuruan	2013	198.793	992.689	17808.90	208.454
kabupaten Ponorogo	2013	97.509	890.922	10554.50	159.109
kabupaten Probolinggo	2013	86.530	848.994	9993.80	152.839
kabupaten Sampang	2013	63.041	683.243	16204	121.316
kabupaten Sidoarjo	2013	721.795	1.104.580	75044	433.261
kabupaten Situbondo	2013	67.498	692.549	10140.10	127.818
kabupaten Sumenep	2013	91.137	917.539	8375.20.00	168.311
kabupaten Trenggalek	2013	80.965	737.815	9496.70	139.028
kabupaten Tuban	2013	185.415	849.399	39039.40	154.385
kabupaten Tulungagung	2013	121.703	996.301	20164.30	164.178
Kota Batu	2013	39.249	374.362	286050.70	24.184
Kota Blitar	2013	56.370	355.673	65408.80	86.255
Kota Kediri	2013	126.965	562.943	8018.60	201.992

Kota Madiun	2013	55.684	474.093	3566.70	89.186
Kota Malang	2013	262.741	746.687	3446.80	128.510
Kota Mojokerto	2013	60.806	354.452	4315.10.00	100.370
Kota Pasuruan	2013	51.343	353.128	5911.30.00	72.014
Kota Probolinggo	2013	73.521	414.534	37547.70	92.889
Kota Surabaya	2013	257.079	1.160.026	7470.70	693.756



Lampiran 3. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Kesehatan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	DAU	PDRB	Belanja Daerah
kabupaten Bangkalan	2014	122.079	854.874	76336	290.505.161.053
kabupaten Banyuwangi	2014	249.037	1.254.496	41971.70	242.064.041.539
kabupaten Blitar	2014	176.939	1.027.252	21476.90	152.727.522.243
kabupaten Bojonegoro	2014	262.952	920.522	10681	323.008.534.552
kabupaten Bondowoso	2014	122.174	826.284	42005.70	140.276.182.600
kabupaten Gresik	2014	842.197	863.398	21099.90	316.224.927.369
kabupaten Jember	2014	508.051	1.539.723	17851.90	436.438.429.269
kabupaten Jombang	2014	256.126	1.007.166	44292	271.676.707.264
kabupaten Kediri	2014	126.027	1.144.879	19920.20	308.399.761.213
kabupaten Lamongan	2014	266.767	1.042.125	35519.90	201.432.715.925
kabupaten Lumajang	2014	170.243	898.218	52550.40	188.890.981.672
kabupaten Madiun	2014	128.676	808.843	14142.90	170.256.518.132
kabupaten Magetan	2014	122.840	840.087	10169.70	172.135
kabupaten Malang	2014	333.189	1.572.192	22890	246.983.821.994
kabupaten Mojokerto	2014	190.236	899.109	106434.30	230.595.627.093
kabupaten Nganjuk	2014	237.474	1.004.038	21793.20	265.324.685.704
kabupaten Ngawi	2014	138.774	980.530	10291.70	
kabupaten Pacitan	2014	61.152	700.743	8582.20.00	119.663
kabupaten Pamekasan	2014	125.126	788.618	11632.90	134.642
kabupaten Pasuruan	2014	372.454	1.068.869	18682.20	262.341.674.109
kabupaten Ponorogo	2014	97.509	970.788	11104.50	223.890.308.608
kabupaten Probolinggo	2014	163.832	929.381	10572.40	195.087.114.400
kabupaten Sampang	2014	121.298	753.954	17369.20	138.691.151.243
kabupaten Sidoarjo	2014	109.057	1.199.036	80105.40	433.261
kabupaten Situbondo	2014	125.964	766.543	10652.40	172.682.737.380
kabupaten Sumenep	2014	166.654	984.839	8846.20.00	196.659.239.562
kabupaten Trenggalek	2014	80.965	815.508	9998.50.00	155.722.310.421
kabupaten Tuban	2014	260.939	926.685	39934.80	175.687.148.872
kabupaten Tulungagung	2014	213.010	1.083.859	21265.20	164.178
Kota Batu	2014	80.150	412.378	305947.60	27.590.971.533
Kota Blitar	2014	82.436	392.222	69232.90	89.115.937.512
Kota Kediri	2014	128.676	634.352	8572.10.00	225.847.934.367
Kota Madiun	2014	111.379	511.090	3774.60	112.635.698.000
Kota Malang	2014	353.428	808.448	3649.60	128.510
Kota Mojokerto	2014	92.842	380.780	4561.30.00	123.766.599.800
Kota Pasuruan	2014	92.731	391.843	6261.90	91.415.063.446
Kota Probolinggo	2014	108.621	454.208	39724.70	108.119.530.155
Kota Surabaya	2014	352.013	1.200.889	7965.30.00	740.273.373.971

Lampiran 4. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Kesehatan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	DAU	PDRB	Belanja Daerah
kabupaten Bangkalan	2015	122.079	888.673	81360.40	287.247.040.956
kabupaten Banyuwangi	2015	249.037	1.288.941	44222.60	242.064.041.539
kabupaten Blitar	2015	176.939	1.037.911	21750.60	182.316.119.711
kabupaten Bojonegoro	2015	262.952	895.987	11223.10	417.420.733.050
kabupaten Bondowoso	2015	122.174	862.600	44529.90	204.889.327.649
kabupaten Gresik	2015	842.197	873.266	22316.90	388.051.496.525
kabupaten Jember	2015	508.051	1.586.837	18676.90	506.494.670.815
kabupaten Jombang	2015	256.126	1.032.325	46792.30	317.389.877.054
kabupaten Kediri	2015	272.923	1.177.392	20925.50	292.634.740.335
kabupaten Lamongan	2015	266.767	1.064.301	37256	325.709.579.665
kabupaten Lumajang	2015	170.243	923.492	55317.80	229.108.136.878
kabupaten Madiun	2015	128.676	832.357	14875.40	194.563.508.548
kabupaten Magetan	2015	122.840	856.279	10704.90	180.853.651.608
kabupaten Malang	2015	333.189	1.613.162	24007.70	246.983.821.994
kabupaten Mojokerto	2015	400.009	923.748	112012.90	268.857.406.909
kabupaten Nganjuk	2015	237.474	1.024.223	22960.20	310.234.084.689
kabupaten Ngawi	2015	138.774	995.119	10823.90	190.304.046.769
kabupaten Pacitan	2015	89.470	714.847	9019.50.000	145.980.370.297
kabupaten Pamekasan	2015	125.126	817.904	11874.50	239.437.470.355
kabupaten Pasuruan	2015	372.454	1.089.359	19571	305.969.875.950
kabupaten Ponorogo	2015	177.248	993.319	11687.90	252.750.647.598
kabupaten Probolinggo	2015	163.832	956.970	11086.50	245.351.362.445
kabupaten Sampang	2015	121.298	788.345	16906.80	186.647.077.256
kabupaten Sidoarjo	2015	109.057	1.206.660	84415.70	615.005.008.237
kabupaten Situbondo	2015	125.964	787.729	11179.60	227.262.780.002
kabupaten Sumenep	2015	166.654	1.010.159	9316.90	196.659.239.562
kabupaten Trenggalek	2015	124.094	839.498	10501.60	187.153.002.544
kabupaten Tuban	2015	260.939	955.940	46892.80	244.487.764.510
kabupaten Tulungagung	2015	213.010	1.111.457	22326.60	254.431.392.000
Kota Batu	2015	80.150	413.220	324215.20	27.590.971.533
Kota Blitar	2015	82.436	400.654	72945.50	131.189.852.704
Kota Kediri	2015	128.676	832.357	9145.90	257.913.642.962
Kota Madiun	2015	111.379	509.817	3991.40.00	110.916.679.000
Kota Malang	2015	353.428	818.759	3856.90	319.965.937.000
Kota Mojokerto	2015	92.842	382.374	4813.30.00	177.781.594.550
Kota Pasuruan	2015	92.731	399.095	6628.80	130.297.370.868
Kota Probolinggo	2015	108.621	463.650	41952.10	131.967.052.752
Kota Surabaya	2015	352.013	1.147.385	8455.40.00	892.090.337.635

Lampiran 5. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Kesehatan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Kabupaten/kota	Tahun	PAD	DAU	PDRB	Belanja Daerah
kabupaten Bangkalan	2016	165.985	1.012.243	85835.10	287.247.040.956
kabupaten Banyuwangi	2016	307.162	1.341.343	46526.60	391.128.491.373
kabupaten Blitar	2016	195.226	1.128.511	22311.70	269.013.721.405
kabupaten Bojonegoro	2016	290.865	949.118	11807.60	42.976.016.079
kabupaten Bondowoso	2016	138.315	926.596	46924.60	260.756.576.663
kabupaten Gresik	2016	924.976	923.469	23623.80	434.790.578.455
kabupaten Jember	2016	485.081	1.709.893	19555.20	124.425.906.604
kabupaten Jombang	2016	309.510	1.111.301	49321.90	420.158.548.727
kabupaten Kediri	2016	291.774	1.242.231	21991.40	170.061.993.439
kabupaten Lamongan	2016	317.130	1.166.656	39081.80	59.314.052.409
kabupaten Lumajang	2016	177.205	990.248	58247.30	75.338.289.228
kabupaten Madiun	2016	151.441	893.566	15661.80	43.917.311.774
kabupaten Magetan	2016	145.800	916.052	11268.90	66.947.713.508
kabupaten Malang	2016	394.871	1.613.162	25211.90	474.792.428.882
kabupaten Mojokerto	2016	413.775	991.180	118179.20	309.483.988.132
kabupaten Nganjuk	2016	280.808	1.078.696	24199.10	411.397.264.377
kabupaten Ngawi	2016	161.921	1.058.208	11398.10	190.304.046.769
kabupaten Pacitan	2016	109.873	807.908	9489.10.00	133.457.609.131
kabupaten Pamekasan	2016	142.771	862.936	12606.80	258.936.536.253
kabupaten Pasuruan	2016	452.457	1.200.612	20504.10	529.632.927.534
kabupaten Ponorogo	2016	212.719	993.319	12305.70	61.535.447.495
kabupaten Probolinggo	2016	201.794	1.062.583	11640.80	304.336.723.236
kabupaten Sampang	2016	120.965	788.345	17018.60	258.731.642.984
kabupaten Sidoarjo	2016	120.378	1.206.660	89011.20	678.104.406.204
kabupaten Situbondo	2016	163.808	787.729	11735.60	280.366.773.335
kabupaten Sumenep	2016	169.032	1.010.159	9815.80	354.765.345.305
kabupaten Trenggalek	2016	142.097	839.498	11026.50	277.518.813.485
kabupaten Tuban	2016	300.384	955.940	57187.40	299.784.786.714
kabupaten Tulungagung	2016	240.482	1.111.457	23446.40	359.219.073.182
Kota Batu	2016	118.739	413.220	343652.60	31.928.262.105
Kota Blitar	2016	108.170	400.654	76959.40	172.065.098.912
Kota Kediri	2016	191.731	832.357	9750.90	60.380.576.818
Kota Madiun	2016	132.435	509.817	15661.80	110.916.679.000

Kota Malang	2016	379.846	818.759	4079.30.00	147.850.318.970
Kota Mojokerto	2016	122.036	382.374	5076.40.00	39.982.428.138
Kota Pasuruan	2016	110.875	399.095	7018.30.00	154.478.558.739
Kota Probolinggo	2016	130.171	463.650	44303.90	115.423.769.075
Kota Surabaya	2016	383.915	1.147.385	8954.70	946.839.548.712



Lampiran 6. Perhitungan *e-views*

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/28/18 Time: 14:24

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.935460	89381.71	1.046590	0.2966
X1	0.206281	0.036116	5.711636	0.0000
X2	0.347883	0.070779	4.915080	0.0000
X3	0.183547	0.850680	3.252273	0.0021

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.820422	Mean dependent var	223510.6
Adjusted R-squared	0.772214	S.D. dependent var	151583.3
S.E. of regression	72346.08	Akaike info criterion	25.40481
Sum squared resid	7.80E+11	Schwarz criterion	26.10549
Log likelihood	-2372.457	Hannan-Quinn criter.	25.68864
F-statistic	17.01813	Durbin-Watson stat	1.624451
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.518499	0.162959
X2	0.518499	1.000000	0.806428
X3	0.162959	0.806428	1.000000

b. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/28/18 Time: 14:24

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.935460	89381.71	1.046590	0.2966
X1	0.206281	0.036116	5.711636	0.0000
X2	0.347883	0.070779	4.915080	0.0000
X3	0.183547	0.850680	3.252273	0.0021

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.820422	Mean dependent var	223510.6
Adjusted R-squared	0.772214	S.D. dependent var	151583.3
S.E. of regression	72346.08	Akaike info criterion	25.40481
Sum squared resid	7.80E+11	Schwarz criterion	26.10549
Log likelihood	-2372.457	Hannan-Quinn criter.	25.68864
F-statistic	17.01813	Durbin-Watson stat	1.924451
Prob(F-statistic)	0.000000		

dL= 1,7198 dU= 1,8057 4-dL= 2,2802 4-dU= 2,1943

c. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: REABS

Method: Ordinary Least Squares

Date: 05/28/18 Time: 14:37

Sample: 2012 2016

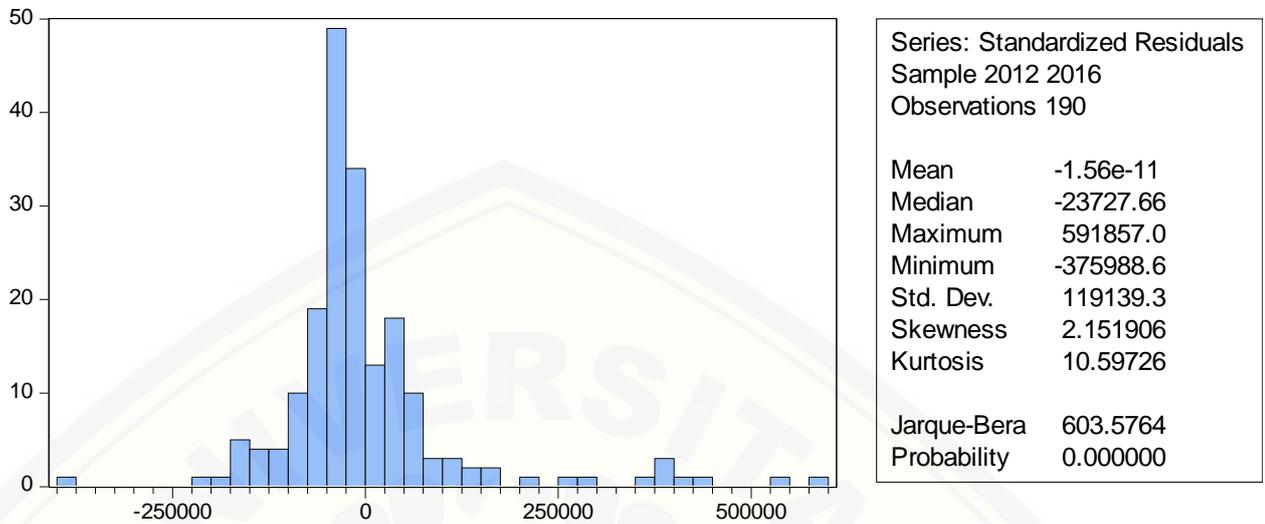
Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-30336.71	21674.86	-1.399626	0.1633
X1	0.110174	0.026696	1.126913	0.2281
X2	0.053528	0.051805	1.033273	0.3028
X3	-0.040333	0.109460	-0.368470	0.7129
R-squared	0.147709	Mean dependent var	72222.16	
Adjusted R-squared	0.133962	S.D. dependent var	94248.74	
S.E. of regression	87708.96	Akaike info criterion	25.62226	
Sum squared resid	1.43E+12	Schwarz criterion	25.69062	
Log likelihood	-2430.115	Hannan-Quinn criter.	25.64995	
F-statistic	10.74509	Durbin-Watson stat	0.661512	
Prob(F-statistic)	0.000002			

d. Uji Normalitas



Lampiran 7. Analisis Deskriptif

Variabel	PAD	DAU	PDRB	Belanja Daeah
Min	31.494	309.103	140	20.260
Max	924.976	1.709.893	76.336	946.839
Mean	180.851	856.021	11.229	141.453
Std.Dev	144.084	282.866	19.222	172.330